PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PASURUAN

UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ADI WIBOWO**
2. Jabatan : **WALIKOTA**
3. NHK : **759797**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 3.505.120.000

1. Tanah Seluas 1.408 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, Rp. 239.360.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1.672 m2/200 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, Rp. 752.400.000
3. Tanah Seluas 890 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, Rp. 445.000.000
4. Tanah Seluas 2.058 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, Rp. 205.800.000
5. Tanah Seluas 1.016 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 162.560.000
6. Tanah Seluas 3.000 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, Rp. 600.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 311.500.000

1. MOTOR, HONDA NF 125 TR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. LAINNYA, POLYGON MOUNTAIN BIKE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000

3. LAINNYA, EXOTIC MOUNTAIN BIKE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
4. MOTOR, WINFLY N9 PRO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
5. MOBIL, TOYOTA VENTURER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000
6. LAINNYA, POLYGON ROAD BIKE Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**14.000.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**213.000.000**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**4.043.620.000**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**230.000.000**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**3.813.620.000**

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.